

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - INDIA



DEPARTEMEN PERTANIAN



391.7 (910 : 540)

Bibliografi

lib

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - INDIA



S

(9/9.9.5)



DEPARTEMEN PERTANIAN RI

2001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya **Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral Indonesia – India**. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan wawasan dalam membangun kerjasama secara bilateral dengan negara tersebut.

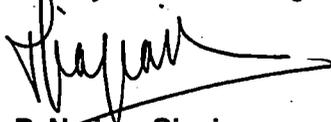
Buku kecil ini merupakan kumpulan informasi awal tentang kerjasama bilateral yang berisikan: keadaan umum negara India, potensi sumberdaya alam dan pertanian yang dimiliki, perkembangan kerjasama bilateral dengan Indonesia dan peluang kerjasama yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang. Buku ini merupakan salah satu judul dari 35 judul Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral dan Regional yang disusun oleh Bagian Proyek Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian untuk tahun 2001.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang dalam atas kerja keras tim kecil yang telah menyusun 35 judul buku dalam waktu singkat diantara kesibukan tugas sehari-hari.

Kami menyadari keterbatasan data dan informasi yang didapat, analisis yang masih dangkal serta kemampuan membuat narasi dalam kurun waktu yang sangat terbatas. Untuk itu dengan rendah hati kami mengharapkan masukan dari pembaca guna penyempumaan buku ini pada saat mendatang.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan langkah kerjasama bilateral dengan negara India.

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri



Ir. P. Natigor Siagian



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
I. KEADAAN UMUM	1
1.1. Sejarah Singkat	1
1.2. Politik dan Pemerintahan	3
1.3. Sosial Ekonomi	6
II. POTENSI NEGARA	9
2.1. Keadaan Geografis	9
2.2. Potensi Alam dan Pertanian	11
III. PERKEMBANGAN KERJASAMA	14
3.1. Kerjasama Bidang Politik	14
3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi	19
3.3. Kerjasama Teknik	23
IV. PELUANG KERJASAMA	30
LAMPIRAN	34



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM	32



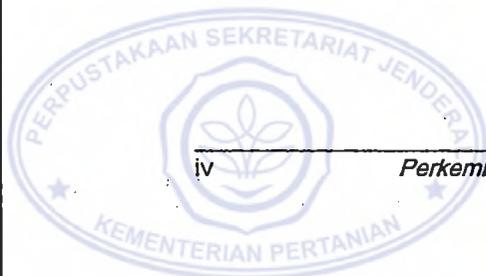
DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perkembangan Produksi Sereal dan Umbi-umbian Negara India Tahun 1991-1998	13
2.	Perkembangan Luas Areal Tanaman Sereal dan Umbi-umbian Negara India Tahun 1991-1998	13



TIM PENYUSUN

- Penasehat** : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
- Pengarah** : Kepala Bagian Kerjasama Bilateral
Kepala Bagian Kerjasama Regional
- Penanggung Jawab** : Ir. Metralinda Tunus, M.Sc./ Kepala Bagian
Kerjasama Multilateral
- Ketua Tim** : Ir. Iwan Ridwan, MM.
- Anggota** : Drs. Djoko Supono, MM.
Ir. Zulkifli Ali, M.Si.
Ade Chandradijaya, S.TP., M.Sc.
Henny Nurliani, S.Pi.
Budi Supriyono
Yayah Mardianah, SE.
Ir. Juariah
Budiarto
Nunik Ernawatingtyas
Abidan Rajaguguk
Ending



I. KEADAAN UMUM

1.1. Sejarah Singkat

Sebelum kedatangan orang Eropa, India pernah mengalami abad keemasan pada masa kerajaan Mughal yang berhasil mendirikan bangunan-bangunan bersejarah, karya seni dan kesusasteraan. Pada awal abad ke 15, para Mughal yang berasal dari Asia Barat (Afghanistan) telah menyebarkan pengaruh agama dan kebudayaan Islam ke seluruh India. Setelah berhasil mengalahkan Kesultanan Delhi, para Mughal mendirikan kerajaan yang berkuasa selama beberapa abad lamanya di India. Pada masa itu, terdapat enam orang Raja Mughal yang terkenal, yaitu Babur (1527-1530), Humayin (1530-1556), Akbar (1556-1605), Jehangir (1605-1627), Shah Jahan (1627-1658) dan Aurangzeb (1658-1707). Dari keenam Mughal tersebut yang paling terkenal adalah Shah Jahan, karena berhasil meninggalkan salah satu keajaiban dunia, yaitu gedung Taj Mahal.

Namun kekuasaan para Mughal tersebut tidaklah berlangsung lama. Di bagian selatan dan tengah sub-kontinen India, peninggalan kerajaan Mughal lambat laun dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu yang masih berkuasa seperti Rajput dan Marathas. Kekuasaan kerajaan-kerajaan inipun tidak berjalan langgeng setelah bangsa Eropa mulai menginjakkan kakinya di India.

Pada tahun 1498, seorang berbangsa Portugis, Vasco da Gama mendarat di pantai Kerala dan berhasil menanamkan pengaruh Portugis di Goa pada tahun 1510. Mengingat Portugis tidak memiliki sumberdaya yang mencukupi untuk mempertahankan daerah jajahannya, maka kekuasaannya berangsur-angsur digantikan oleh bangsa Eropa lainnya, yaitu Inggris, Spanyol, Belanda dan Perancis. Tahun 1612, Inggris mulai memasuki India melalui "British East India Company" dan berhasil membuka pelabuhan-pelabuhan dagang di Madras (1640), Bombai (1668) dan Calcutta (1690).

Kekuasaan Inggris yang semula lebih bersifat dagang, kemudian mulai melakukan penguasaan secara fisik dan politis, yang mencapai puncaknya dalam pertempuran Buxar pada tahun 1756 melawan para raja India. Kemenangan dalam pertempuran tersebut memberikan Inggris kekuasaan atas daerah-daerah Benggala, Bihar dan Orissa, yang kemudian dalam waktu kurang dari setengah abad disusul dengan kekuasaan atas bagian-bagian lain India. Pada tahun 1842, Pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan atas India dari British East India Company dan dengan demikian secara mutlak menancapkan kekuasaannya atas India. Inggris selanjutnya menempatkan seorang Gubernur Jenderal di India sebagai Wakil Mahkota dan Pemerintahnya.

Perlawanan terhadap penjajahan Inggris diawali pada awal abad ke-19, ketika Mahatma Gandhi kembali dari Afrika Selatan dan "Congress Party" dibentuk. Perjuangan kemerdekaan India yang dipelopori Mahatma Gandhi dengan prinsip "non-cooperation" dan "non-violence" semakin meluas, mulai dari kelas menengah, para petani dan penduduk desa, ditambah lagi dengan "Congress Party" yang semakin kuat.

Selama kurang lebih setengah abad lamanya, gerakan kemerdekaan India menuntut kemerdekaan penuh untuk negara India. Pemimpin-pemimpin terkenal dalam gerakan ini antara lain ialah Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru dan Mohammad Ali Jinnah. Pada tahun 1935, Inggris mengumumkan apa yang dinamakan "The Government of India Act" yang merupakan Undang-Undang Dasar untuk pemilihan Dewan-Dewan Perwakilan di propinsi-propinsi. Banyak kedudukan dalam Dewan-Dewan tersebut dimenangkan oleh National Congress dan Muslim League.

Pada tahun 1940, untuk pertama kalinya Muslim League menuntut satu negara khusus bagi orang-orang Islam. Menjelang



berakhirnya Perang Dunia II, tuntutan kemerdekaan makin Mendesak dan menghasilkan dibentuknya suatu Constituent Assembly.

Muslim League tetap menuntut dibentuknya suatu negara tersendiri bagi penduduk Islam India. Bulan Maret 1947 Inggris mengumumkan rencana "Partition Plan" untuk memisahkan dua komunal Muslim dan Hindu di India.

Pada tanggal 3 Juni 1947, Pemerintah Inggris membebaskan Pakistan sebagai negara baru bagi kelompok Muslim. Tanggal 1 Juli 1947, Parlemen Inggris menyetujui "The India Independence Act" sebagai landasan proklamasi kemerdekaan India, yang dilanjutkan dengan pengalihan kekuasaan pada tanggal 15 Agustus 1947.

Setelah berhasil menanggulangi dua masalah besar pada awal kemerdekaannya, yaitu masalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dan pengintegrasian lebih kurang 600 kerajaan-kerajaan kecil, wilayah bekas jajahan Inggris ini menjadi negara India dan Pakistan. India mulai menyusun kerangka kehidupan kenegaraannya dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar yang mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1950. Sejak tanggal ini India resmi menjadi Republik India dengan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan

1.2. Sistem Politik dan Pemerintahan

a. Kepartaian dan Organisasi Masa

Pasal 19 UUD India menjamin hak asasi untuk perserikatan-perserikatan, termasuk parpol dan ormas. Ayat (4) dari pasal tersebut memberikan pula kekuasaan kepada Parlemen untuk menyusun undang-undang guna mengatur pelaksanaan hak tersebut sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan, kedaulatan dan integritas negara serta ketertiban masyarakat dan moralitas bangsa.

Partai-partai politik yang terdapat sekarang ini diatur

melalui Tertib Tanda Gambar Pemilu yang dikeluarkan oleh komisi Pemilu tahun 1968, yang menetapkan antara lain syarat-syarat bagi suatu parpol untuk diakui dan diberikan tanda gambar oleh Komisi tersebut.

Menurut kategorinya, partai-partai politik dapat dibagi dua, yaitu Partai Nasional dan Partai Daerah. Suatu partai politik dapat diakui sebagai suatu Partai Nasional apabila parpol tersebut sekurang-kurangnya mempunyai cabang di empat negara bagian.

b. Parlemen

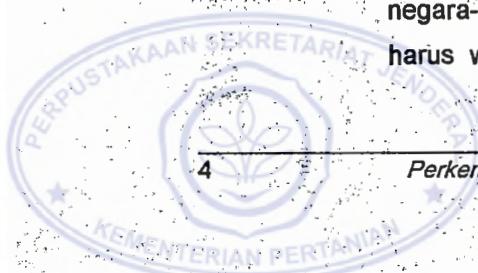
Parlemen India terdiri dari Dewan Negara atau Council of State (Rajya Sabha) dan Dewan Perwakilan Rakyat atau House of the People (Lok Sabha). Masing-masing bersidang sekali dalam enam bulan. Dalam hal-hal tertentu kedua majelis tersebut dapat menyelenggarakan sidang bersama.

c. Kabinet

Sesuai dengan sistem Demokrasi Parlementer yang dianut India, Pemerintah bertanggungjawab kepada Parlemen. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden, tetapi kekuasaan ini dijalankan oleh Dewan Menteri yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Dewan Menteri terdiri dari Menteri Kabinet, Menteri Negara dan Wakil-wakil menteri. Menteri-menteri Kabinet atau Cabinet Ministers yang dipimpin oleh Perdana Menteri merupakan badan yang membuat kebijaksanaan Pemerintah. Perdana Menteri dan menteri-menteri lain diangkat oleh Presiden.

d. Presiden

Presiden dipilih oleh Electoral College yang terdiri dari anggota-anggota Parlemen dan anggota-anggota legislatif negara-negara bagian (States Assemblies). Calon Presiden harus warganegara India dan berumur tidak kurang dari 35



tahun serta memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan bagi seorang calon anggota Lok Sabha. Masa jabatan Presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali.

Sesuai Konstitusi, Presiden dapat memerintahkan Parlemen untuk bersidang, atau menangguhkan sidang atau bahkan membubarkan Parlemen. Presiden juga berhak mengeluarkan peraturan-peraturan, kecuali jika Lok Sabha dan Rajya Sabha sedang bersidang. Di samping itu, jika terjadi kekacauan pada suatu negara bagian sehingga pemerintahan tidak berfungsi, maka Presiden dapat mengambil wewenang pemerintahan negara bagian tersebut dengan menyatakan negara bagian itu berada di bawah kekuasaan Presiden (President Rule). Presiden juga dapat menyatakan diberlakukannya keadaan darurat untuk seluruh India atau daerah tertentu apabila Presiden memandang keamanan nasional atau daerah tersebut terancam.

e. **Wakil Presiden**

Sebagaimana Presiden, Wakil Presiden juga dipilih oleh Electoral College dan telah berumur 35 tahun serta tidak kehilangan haknya sebagai anggota Rajya Sabha. Masa jabatan Wakil Presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali.

Secara fungsional, Wakil Presiden adalah Ketua Rajya Sabha. Jika Presiden tidak dapat melaksanakan fungsinya karena absen, sakit, meninggal dunia, meletakkan jabatan atau diberhentikan, kekuasaan presiden dijalankan oleh Wakil Presiden sampai dilakukan pemilihan presiden baru dalam jangka waktu 6 bulan. Selama menjalankan fungsi kepresidenan, Wakil Presiden tidak lagi menjabat Ketua Rajya Sabha.



f. Perdana Menteri

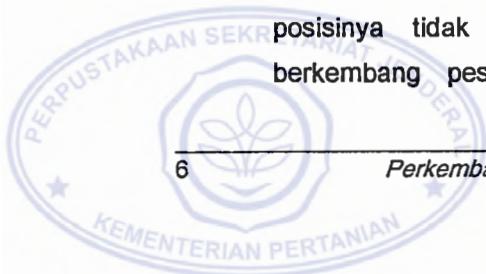
Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dari kalangan Parlemen, yakni seorang pemimpin politik yang memiliki mayoritas suara di Lok Sabha, karena Perdana Menteri dan Dewan Menterinya bertanggungjawab kepada Lok Sabha.

Masa jabatan perdana menteri adalah lima tahun kecuali bila terjadi hal-hal yang luarbiasa seperti dibubarkannya Lok Sabha oleh Presiden sebelum masa baktinya berakhir. Apabila Lok Sabha dibubarkan, Presiden bisa meminta Perdana Menteri untuk terus menjalankan masa jabatannya sampai terbentuknya Lok Sabha yang baru melalui pemilihan umum.

1.3. Sosial dan Ekonomi

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian India antara lain jumlah penduduk yang sangat besar (sudah melebihi 1 milyar jiwa), sebagian besar (2/3) jumlah penduduk India hidup dari hasil pertanian, sering terjadi musibah banjir maupun kekeringan, defisit negara terus meningkat (defisit neraca pembayaran tahun fiskal 1994-1995 sekitarUS\$ 1,5 milyar), hutang luar negeri semakin besar dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Usaha-usaha India untuk berintegrasi dengan ekonomi dunia dilanjutkan oleh pemerintah baru di bawah pimpinan PM Deve Gowda. Hal ini terlihat dari program ekonomi pemerintah United Front yang bertekad untuk melanjutkan terus program liberalisasi ekonomi. Kondisi ini merupakan jawaban India terhadap tantangan dan kesempatan yang ditawarkan oleh proses globalisasi ekonomi dunia antara lain yang menuju terbentuknya WTO. India memahami posisinya tidak berada pada blok-blok ekonomi yang akan berkembang pesat seperti APEC, ASEAN, ME dan NAFTA.



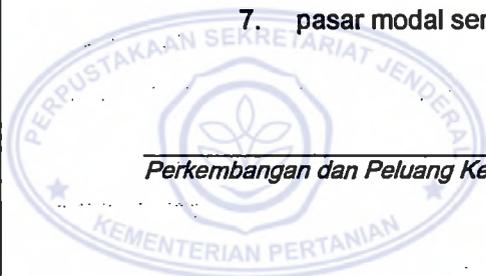
Organisasi SAARC yang mewadahi negara-negara Asia Selatan termasuk India, masih menghadapi kendala yang bersifat politis dan belum menjanjikan para anggotanya mendapat keuntungan.

Majalah "News Behind News" terbitan 19 April 1999 mengulas : *Pemerintah BJP dijatuhkan pada saat mulai berhasil mengendalikan perekonomian. Pemerintah Vajpayee pada saat memulai sudah dihadang dengan problem-problem ekonomi yang cukup kompleks. Pemerintah telah mengambil beberapa inisiatif dalam sektor-sektor tertentu untuk mengaktifkan kembali perekonomian nasional yang sejalan dengan liberalisasi dan globalisasi.*

Diantara hasil-hasil yang terpenting adalah disahkannya Undang-undang Paten oleh Parlemen, selesainya tugas perumusan persetujuan garansi terhadap proyek-proyek ketenagaan jalur cepat yang pada masa pemerintahan partai Kongres secara prinsip telah disetujui. Pengumuman kebijaksanaan telekomunikasi yang bemapaskan liberalisasi dan mengajukan Undang-undang Asuransi ke Parlemen yang sejalan dengan globalisasi.

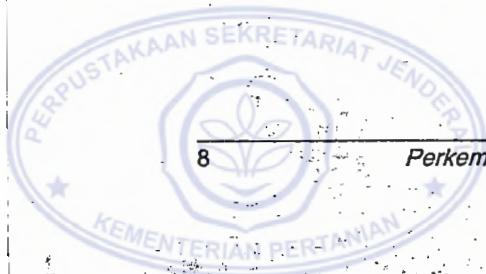
Sementara itu, surat kabar "The Observer" tanggal 21 April 1999 mengemukakan bahwa secara keseluruhan kinerja perekonomian pemerintahan koalisi pimpinan BJP tidak begitu mengecewakan. Faktor-faktor yang mengecewakan adalah :

1. pemerintah belum berhasil membebaskan perekonomian dari resesi;
2. sektor infrastruktur kinerja semakin menurun;
3. kondisi fiskal semakin memburuk yang ditandai dengan meningkatnya defisit fiskal;
4. ekspor semakin lesu;
5. iklim investasi tidak membaik;
6. terdapat kecenderungan meningkatnya inflasi;
7. pasar modal semakin lesu;



Faktor-faktor yang menggembirakan, ialah :

1. reformasi ekonomi semakin ditingkatkan;
2. pertumbuhan ekonomi moderat (5,8%);
3. mampu mengatasi sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya;
4. produksi sektor pertanian mencapai tingkat tertinggi;
5. cadangan devisa meyakinkan dengan melewati angka US\$ 30 milyar;
6. sukses menghimpun dana keturunan India di luar negeri melalui "Resurgent India Bond" (RIB) yang berjumlah lebih dari US\$ 4 milyar;
7. RAPBN 1999/2000 mendapat dukungan luas, khususnya sektor swasta.



II. POTENSI NEGARA

2.1. Keadaan Geografis

India merupakan negara terbesar ketujuh di dunia yang terletak di Asia Selatan. Negara ini disebelah utara berbatasan dengan Peg. Himalaya, RR. Cina, dan Nepal; di timur dengan Myanmar, di timurlaut dengan Bangladesh; di barat laut dengan Pakistan dan Afganistan, dan di bagian selatan dengan Samudera Hindia. India juga disebut Bharat. Luas wilayah India sebesar : 3.165.596 km² (tidak termasuk wilayah seluas : 120.849 km² yang diduduki Cina) dan Pakistan di daerah Jammu dan Kashmir). Satuan mata uang : *Rupee India (Rs)*.

Jumlah penduduk India : 889.700.000 jiwa dengan kepadatan penduduk 281/km². Penduduk India sebagian besar beragama : Hindu (83%), Islam (11%), Kristen (2%), Sikh (2%), Kepercayaan lain (Budha, Jain, dan Zoroaster) (2%). Bahasa yang digunakan oleh penduduk India adalah Hindi dan Inggris.

Berdasarkan bentang alamnya, India dapat dibagi atas tiga daerah : Pegunungan Himalaya, Dataran rendah Gangga, dan semenanjung bagian selatan. Pegunungan Himalaya terdiri dari deretan pegunungan, dengan dataran tinggi dan lembah besar, diantaranya Dataran Tinggi Kashmir dan Lembah Kulu. Pegunungan utama didaerah ini adalah Peg. Himalaya dan Peg. Karakoram. Struktur Peg. Himalaya cukup kompleks dan dalam garis besar dapat dibagi atas 3 (tiga) rangkaian : Himalaya luar meliputi Peg. Siwaliks, Himalaya Kecil di bagian tengah berupa daerah lipatan, dan Himalaya Besar di bagian utara Peg. Assam sebelah timur India meliputi Bukit Garo dan Khasi. Daerah ini mendapat curah hujan yang sangat banyak. Cherrapunji (1.313 m) mendapat hujan 11.400 mm per tahun, karena letaknya menghadap kearah datangnya angin. Shillong (1.499 m) yang letaknya membelakangi arah angin, hanya mendapat hujan 2.133 mm per tahun, sedangkan Sylhet (termasuk wilayah Bangladesh) di dataran rendah mendapat hujan 3.998 mm per tahun.

Dataran Rendah Gangga terbentuk oleh S. Indus, S. Gangga dan S. Brahmaputra. Daerah ini merupakan daerah aluvial berpenduduk padat. Permukaan daerah ini sangat datar, perbedaan tinggi antara S. Yamuna dekat Delhi dan Teluk Benggala yang jaraknya hampir 1.610 km, hanya sekitar 213 m. Lembah S. Gangga merupakan daerah pertanian yang terpenting di India; dasar lembah ini merupakan akumulasi pasir dan tanah liat. Di daerah anak-anak S. Gangga yang besar, yakni S. Yamuna dan S. Ghaghara, banyak ditanam padi, gandum, tebu, biji-bijian, jagung, dan kapas. Dataran rendah Benggala, yang bersambung ke Bangladesh, merupakan endapan dari luapan S. Gangga dan S. Brahmaputra. Bagian hilir S. Gangga yang disebut Sundarbans, terutama menghasilkan *yute*.

Semenanjung bagian selatan umumnya terdiri dari perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 456 m - 1.220 m, diantaranya Peg. Aravalli, Vindhiya, Satpura, Maikala, dan Ajanta. Di bagian timur dan barat semenanjung ini terdapat Peg. Ghats Barat Peg. Ghats Timur; di bagian selatan terdapat Bukit Nilgiri. Dataran tinggi yang terletak disudut barat laut berbatasan dengan Lembah Gangga. Di sebelah selatan terletak bukit-bukit Vindhiya (1.219 m). Tanaman penting daerah ini ialah gandum dan kapas. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang banyak mengandung mineral. Daerah di bagian barat Dekan, yang merupakan plato tanah hitam, banyak ditanami sorghum dan kapas. Pantai barat adalah jalur dataran rendah dan jalur lereng tebing yang sempit.

Curah hujan di daerah yang menghadap kelaut mencapai lebih dari 2.500 mm per tahun, tetapi makin ke utara makin kurang. Semenanjung bagian selatan menerima curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Daerah ini ditanami padi, kapas, tebu dan cokelat.

Dahulu sebagian besar daratan India diliputi hutan, tetapi banyak diantaranya yang sudah berubah menjadi semak belukar; kini hanya sekitar seperempat dari seluruhnya daratannya (sekitar 822.000 km²) yang dapat digolongkan sebagai hutan.

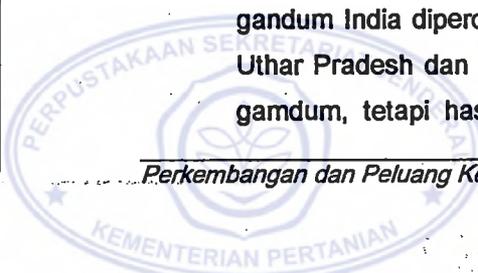
Pada pokoknya India mengalami dua macam iklim, yakni iklim tropis dan sub-tropis, yang berbeda secara lokal. Pergantian musim terjadi sebagai berikut: musim dingin berlangsung dari Oktober sampai akhir Pebruari; musim panas dari awal Maret sampai pertengahan Juni; musim hujan dari pertengahan Juni sampai September. Curah hujan di pantai barat lebih dari 2.000 mm per tahun; Madras, Dekan bagian selatan dan bagian baratlaut 500-1.000 mm per tahun; daerah Himalaya mendapat curah hujan yang sangat besar.

2.2. Potensi Alam dan Pertanian

Ekonomi India bertumpu pada pertanian. Hampi sepertiga dari GNP India diperoleh dari sektor ini. Tetapi perkembangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja belum dapat mengejar angka kenaikan penduduk. Sejak tahun 1960-an pemerintah menjalankan kebijakan 'revolusi hijau', yakni menggalakan penggunaan jenis-jenis bibit baru untuk meningkatkan hasil pertanian. Dalam pelaksanaannya, kebijakan itu menuntut tenaga-tenaga petani yang terampil dan harus mengatasi hambatan-hambatan tradisional. Namun demikian hasil bumi beberapa jenis tanaman perdagangan cukup berkembang di India.

Hampir tiga perempat daerah pertanian India ditanami dengan tanaman pangan, diantaranya seperempat bagian dengan padi. Ada kira-kira 4000 jenis padi yang ditanam dan masing-masing memerlukan kondisi tanah dan iklim tertentu, seperti suhu rata-rata 24 °C dan curah hujan 1500 – 2000 mm sehingga tidak memerlukan lagi pengairan. Pada kebanyakan tanaman di daerah-daerah delta sepanjang pantai timur antara lain di Benggala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh.

Ladang gandum meliputi sepertiga lahan pertanian India. India dapat menghasilkan 50 juta ton gandum pertahun. Dua pertiga hasil gandum India diperoleh dari negara-negara bagian Madhya Pradesh, Uthar Pradesh dan Punjab. Lahan untuk jowar lebih luas dari lahan gamdum, tetapi hasilnya lebih rendah. Jenis tanaman ini banyak



ditanam di India tengah dan selatan, yakni di Maharashtra, Andhra Pradesh, Mysore dan Madhya Pradesh. Bajra, jagung, ragi (*Eleusine coracana*, sejenis rumput-rumputan), padi-padian dan barli (semacam gandum) juga ditanam di beberapa daerah.

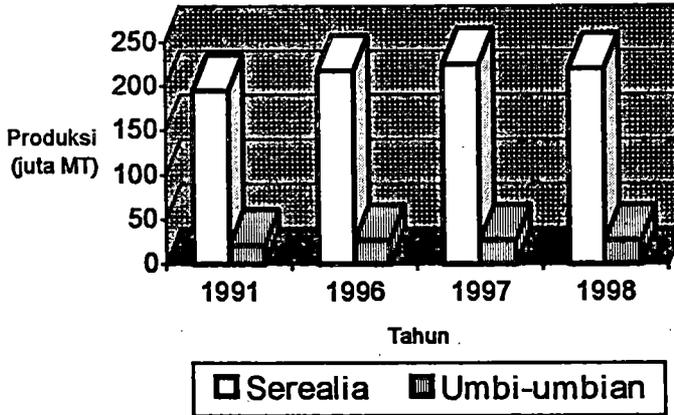
Hasil bumi untuk diperdagangkan terdiri dari hasil perkebunan besar dan hasil pertanian tradisional, komoditas terpenting adalah teh. India mengeksport teh sebelum merdeka dan setelah merdeka penanamannya diperluas. Kopi dan karet juga banyak ditanam India merupakan produsen lada terbesar di dunia.

Hasil bumi untuk diperdagangkan dari sektor pertanian tradisional juga banyak meningkat sesudah India merdeka, tapi sementara itu kebutuhan dalam negeri juga meningkat. Sejak tahun 1975 India menghasilkan 140 juta ton gula pertahun, kapas lebih dari 1 juta ton dan kacang tanah sekitar 7 juta ton. Hampir separoh gula tersebut dihasilkan di Uttar Pradesh; kapas dan kacang tanah terutama dihasilkan di daerah antara Gujarat dan Maharahta disebelah barat, Punjab di utara dan Tamil Nadu di selatan. Tanaman lain adalah kelapa, jute dan mesta (pengganti jute). Yute dan mesta terutama ditanam di Andhra Pradesh.

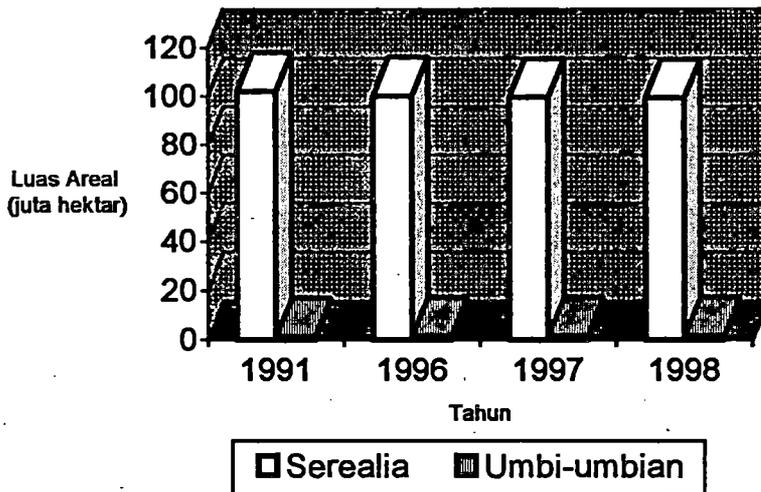
Peternakan juga memegang peranan penting dalam perekonomian India. Walaupun orang Hindu memuja sapi dan tidak memakan dagingnya, jenis ternak ini memegang peran penting dalam bidang pertanian. Umumnya sapi dan kerbau digunakan untuk mengolah tanah pertanian. Ternak penting lainnya bagi India adalah domba dan kambing.

Perkembangan produksi dan luas areal komoditas sereal dan umbi-umbian di India dari tahun 1991 s/d 1998 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.





Gambar 1. Perkembangan Produksi Sereal dan Umbi-umbian Negara India tahun 1991-1998



Gambar 2. Perkembangan Luas Areal Tanaman Sereal dan Umbi-umbian Negara India tahun 1991-1998



III. PERKEMBANGAN KERJASAMA

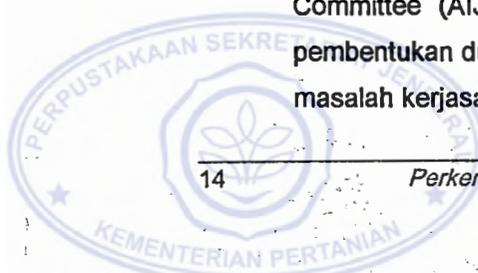
3.1. Kerjasama Bidang Politik

India – ASEAN

Hubungan antara India – ASEAN akan semakin intensif setelah diberikannya status mitra dialog penuh ASEAN kepada India, sebagaimana diputuskan dalam KTT ke-V di Bangkok bulan Desember 1995. Hal ini memungkinkan India ikut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh "dialogue committee" sebagai ganti komite dialog sektoral. Agendanya tidak terbatas kepada pembicaraan mengenai empat sektor saja, yaitu : perdagangan, investasi, turisme dan iptek, tetapi juga menyangkut seluruh bidang kerjasama. India juga akan ikut dalam konsultasi-konsultasi yang akan diselenggarakan setelah sidang-sidang KTM ASEAN.

Pada Sidang Tingkat Menteri ASEAN/AMM ke-29 di Jakarta pada bulan Juli 1996, India secara resmi telah diterima sebagai mitra dialog penuh ASEAN dan sebagai peserta baru ARF. Peningkatan status dialog penuh India dengan ASEAN telah mendapat dukungan publik India. Demikian juga dengan ikut sertanya India dalam ARF (ASEAN Regional Forum). Dari dukungan pendapat umum ini, diperkirakan kebijaksanaan India ke Timur (Look East Policy) akan tetap menjadi prioritas pemerintah India, terlepas dari partai manapun yang berkuasa, karena disamping pertumbuhan kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, India juga kembali menggunakan perjalanan sejarah budayanya sebagai legalitas kebijaksanaan India.

Sebagai tindak lanjut diterimanya India sebagai Mitra Dialog penuh ASEAN, pada tanggal 14-16 November 1996 di New Delhi telah diselenggarakan "First ASEAN-India Joint Cooperation Committee (AIJCC)". Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati pembentukan dua mekanisme dialog ASEAN-India, yaitu AIJCC untuk masalah kerjasama ekonomi dan fungsional dan "ASEAN-India Senior



Official Meeting (SOM)" untuk masalah kerjasama politik dan keamanan. Disamping itu disepakati pula wilayah kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu perdagangan dan investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, pengembangan SDM, infrastruktur serta interaksi rakyat-untuk-rakyat.

Menindaklanjuti salah satu keputusan Pertemuan ke-1 ASEAN-India SOM di New Delhi tanggal 9 Pebruari 1998, pertemuan ke-2 ASEAN-India SOM telah diselenggarakan di Singapura tanggal 25 Pebruari 1999.

India menyampaikan penghargaan atas hasil-hasil yang dicapai oleh ASEAN dan menyatakan bahwa India akan melaksanakan komitmennya untuk meningkatkan kerjasama dialog ASEAN-India. Dalam menyampaikan hubungan India dengan Amerika Serikat, Jepang, dan China, dijelaskan bahwa setelah uji coba senjata nuklir India dilakukan, sikap ketiga negara tersebut sangat keras terhadap India. Kritik tajam terhadap India dilakukan oleh ketiga negara tersebut dalam forum G8 maupun UNSC (Dewan Keamanan PBB). India menjelaskan bahwa pihaknya telah merintis dialog dengan ketiga negara tersebut serta akan meneruskan upaya-upaya untuk menjembatani perbedaan yang ada. Dikemukakan bahwa utusan khusus Menlu India telah bertemu dengan Menlu China dalam kesempatan ARF-5 di Manila. Selain itu India telah melaksanakan putaran ke-9 dialog dengan AS yang dipimpin oleh Stuart Talbott, walaupun dialog belum berjalan seperti yang diharapkan. Dikemukakan bahwa dialog tersebut memfokuskan pada pembahasan mengenai CTBT, FMCT, Export Control, dan Defence Posture.

India - APEC

India berusaha keras untuk dapat menjadi peserta dalam setiap kegiatan dan kerjasama-kerjasama tingkat regional maupun internasional. Selain berkeinginan aktif dalam forum-forum ASEAN, India juga bermaksud menjadi anggota APEC.

Saat ini terdapat sekitar 15 negara yang berkeinginan serius



untuk menjadi anggota atau berpartisipasi dalam kegiatan APEC. KTM V Seattle tahun 1993 telah memutuskan bahwa APEC menerapkan masa moratorium selama 3 tahun, dengan demikian hingga KTM VIII tahun 1996 APEC tidak akan menerima anggota baru.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-VIII di Manila pada bulan November 1996, telah tercatat 11 negara yang berkeinginan serius untuk menjadi anggota atau berpartisipasi dalam kegiatan APEC. Dalam pertemuan ini, para Menteri memutuskan untuk tidak memperpanjang masa moratorium dengan tujuan untuk menerima beberapa anggota baru dalam jumlah terbatas.

Aplikasi-aplikasi keanggotaan yang telah masuk, akan dinilai sesuai dengan kriteria-kriteria yang akan disahkan di Vancouver. Atas dasar kriteria tersebut, akan diputuskan penerimaan beberapa anggota baru di Kuala Lumpur pada tahun 1998. Anggota baru akan secara resmi diterima di Auckland, Selandia Baru pada tahun 1999, setelah mereka mempersiapkan diri untuk memasuki proses APEC khususnya penyiapan rencana aksi individualnya dalam jangka waktu 1 tahun, mulai dari Kuala Lumpur sampai Auckland.

Pada pertemuan SOM di Victoria, Kanada tanggal 27-28 Januari 1997 belum terdapat suatu konsensus mengenai kriteria penerimaan anggota baru APEC. Untuk mengatasi masalah ini delegasi Indonesia menyarankan agar SOM dapat mempercepat penyempurnaan kriteria penerimaan anggota baru sehingga walaupun belum ada kejelasan mengenai hal ini, SOM telah siap melaksanakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam Pernyataan Bersama Para Menteri.

Hubungan bilateral Indonesia-India selama ini berjalan dengan baik. Presiden Soeharto telah berkunjung ke New Delhi untuk menghadiri pertemuan Education For All (EFA) bulan Desember 1993 dan KTT G-15 bulan April 1994.

Di pihak India, PM Narasimha Rao berkunjung ke Indonesia

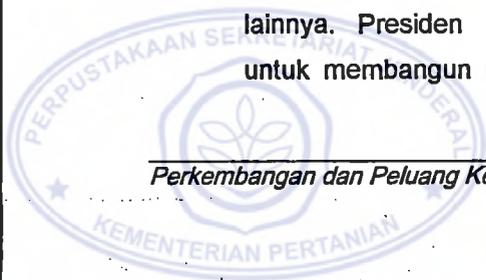


pada bulan September 1992, dalam rangka menghadiri KTT Gerakan Non-Blok ke-10 di Jakarta. Pada bulan Oktober 1995 PM Narasimha Rao berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Soeharto di Cartagena, Columbia dalam rangka menghadiri KTT Gerakan Non-Blok ke-11. Dalam pertemuan singkat tersebut kedua pemimpin sepakat untuk lebih memajukan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tanggal 23 Desember 1998, Indonesia dan India telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) mengenai pembentukan Forum Konsultasi Bersama untuk Konsultasi Bilateral. Forum Konsultasi pada tingkat Menlu tersebut merupakan forum untuk membahas masalah-masalah kedua negara di berbagai bidang dan bertemu secara periodik. Pembahasan masalah sektoral dapat dilakukan pada pertemuan tingkat pejabat tinggi (SOM) dibawah wadah Forum Tingkat Menteri.

Pada tanggal 12 Nopember 1999 telah dilangsungkan pertemuan pertama Joint Consultative Forum (JCF) antara India dan Indonesia di New Delhi, India. Pertemuan ini merupakan realisasi dari MoU yang ditandatangani pada bulan Desember 1997 di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Politik Deplu Nugroho Wisnumurti, sedangkan pihak India dipimpin oleh Sekretaris Kemlu S.T. Devare. Kedua pihak telah membahas berbagai hal yang menyangkut hubungan bilateral, baik di bidang politik, ekonomi, maupun perdagangan, serta berbagai masalah regional dan internasional yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama.

Atas undangan Presiden India K.R. Narayanan, Presiden RI Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan kenegaraan ke India pada tanggal 8-9 Pebruari 2000. Selama kunjungan, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pembicaraan dengan Presiden K.R. Narayanan, PM A.B. Vajpayee, serta beberapa pejabat India lainnya. Presiden RI menyampaikan bahwa kunjungannya adalah untuk membangun kembali hubungan tradisional yang erat dengan



India disegala bidang, khususnya dalam kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua pihak. Presiden RI juga melangsungkan pertemuan dengan ketua oposisi dan Presiden Partai Kongres Sonia Gandhi.

Dalam kesempatan kunjungan Presiden RI ke India, telah ditandatangani berbagai MoU kerjasama, yaitu dalam bidang pariwisata, imbal-beli, serta rencana pembangunan jalur kereta api di Sumatera dan Jawa. Kemungkinan kerjasama yang juga dibahas dalam kunjungan tersebut ialah pembentukan Komisi Bersama Indonesia-India, kerjasama eksplorasi gas alam di Indonesia, kerjasama dalam pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kualitas SDM Indonesia, serta peremajaan dan modernisasi pabrik-pabrik gula di Indonesia. Potensi kerjasama lainnya yang juga ditawarkan oleh India ialah dalam bidang infrastruktur, teknologi, informasi dan perangkat lunak, ketenagaan, mesin-mesin tekstil, dan lain sebagainya.

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Ekonomi Kemlu India S.T. Devare pada tanggal 9 Juni 2000, pemerintah India mendukung integritas wilayah RI serta mengakui Propinsi Papua sebagai bagian dari wilayah negara RI sebagaimana yang tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504. Pernyataan ini berkenaan dengan hasil Kongres Rakyat Papua tanggal 4 Juni 2000 yang menyatakan keinginan untuk merdeka serta melepaskan diri dari wilayah RI.

Rencana kunjungan Menlu India Jaswant Singh ke Indonesia yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Juli 2000 tidak dapat dilaksanakan, sehubungan dengan kepadatan aktivitas Menlu RI Dr. Alwi Shihab. Pihak India kembali menawarkan kesediaan waktu yang berkenan bagi Menlu RI pada bulan Oktober dan Nopember 2000. Pihak India juga mengusulkan agar pada kesempatan pertemuan tersebut dapat dilaksanakan pertemuan pertama "India- Indonesia Joint Commission".

Sebagai balasan atas kunjungan Presiden RI Abdurrahman Wahid ke India, maka PM India Atal Behari Vajpayee melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 10-14 Januari 2001. Pada tanggal 11 Januari 2001 setelah melaksanakan pembicaraan dengan Presiden Abdurrahman Wahid, dilaksanakan penandatanganan:

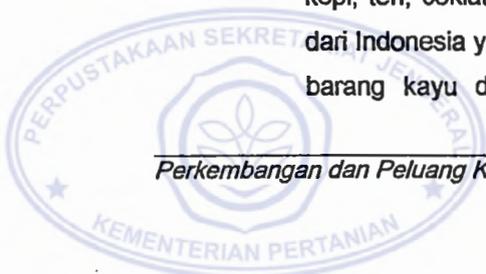
1. MoU Pembentukan Komisi Bersama RI-india
2. Persetujuan Kerjasama dalam Bidang Pertahanan
3. MoU dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Rancangan Kerjasama dibawah MoU Kerjasama Pertanian untuk 2001- 2002
5. Persetujuan dalam rangka Program Pertukaran Kebudayaan untuk Tahun 2001-2003

3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi

a. Hubungan Perdagangan

Sejak ditandatanganinya Persetujuan Perdagangan antara Indonesia-India tanggal 3 Juli 1978 di Jakarta, volume perdagangan kedua negara dari tahun ke tahun terus meningkat, kecuali dalam periode Januari-Oktober 1998. Komoditas impor utama Indonesia dari India ialah: minyak nabati, barang-barang teknik, bahan-bahan celupan/barang-barang perantara dan coal tar, bahan baku katun, bijih besi, produk-produk mineral yang sudah diproses, produk-produk kimia organik dan non-organik, dan lain-lain.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke India adalah: minyak dan lemak nabati, biji logam dan sisa logam, barang kayu dan produk kayu, batu bara kokas dan briket, bagian dari kendaraan bermotor, benang tenun, kain tekstil dan hasilnya, kimia organik, logam tidak mengandung besi, kertas karton dan olahannya, pulp dan kertas, kopi, teh, coklat, rempah-rempah, dan lainnya. Sementara komoditi dari Indonesia yang memiliki nilai impor lebih dari US\$ 10 juta adalah barang kayu dan produk kayu, benang tenun, kain tekstil dan

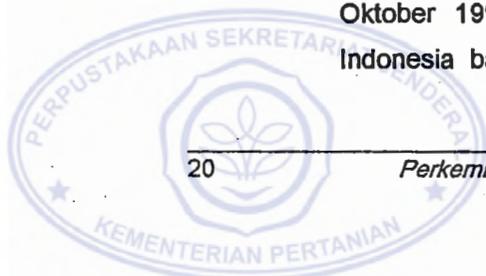


olahannya, minyak dan lemak nabati, buah-buahan dan sayur-sayuran khususnya "raw chesew nut", kertas karton dan olahannya, serta bahan kimia sayuran organik.

Apabila dalam tahun 1992 total perdagangan kedua negara tercatat sebesar US\$ 212,86 juta, maka dalam tahun 1997 meningkat menjadi US\$ 1307.34 juta. Semenjak tahun 1996 total perdagangan kedua negara menembus angka US\$ 1 milyar. Akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia serta menurunnya daya saing produk-produk India, total perdagangan kedua negara dalam periode Januari-Oktober 1998 turun sebesar 35,84 % jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1997. Penurunan ini disebabkan oleh merosotnya ekspor dan impor India ke dan dari Indonesia, yaitu masing-masing sebesar 76,03 % dan 0,98 %, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1997.

Pangsa perdagangan India dengan Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Dalam tahun 1994 pangsa tersebut tercatat sebesar 1,07 %, sedangkan tahun 1997 meningkat menjadi 1,72 %. Perdagangan India dengan Indonesia berada di urutan ke-19, kecuali untuk periode Januari-Oktober 1998, ekspor India ke Indonesia terus meningkat. Dalam tahun 1992 ekspor India ke Indonesia tercatat sebesar US\$ 141,56 juta, sedangkan tahun 1997 mencapai US\$ 596,14 juta, jadi meningkat sebesar 321,1%. Periode 1992-1997, ekspor India ke Indonesia rata-rata meningkat 53,5% setiap tahun. Periode Januari-Oktober 1998, ekspor India ke Indonesia menurun dratis, yaitu sebesar 76,03 % jika dibandingkan dengan periode Januari-Oktober 1998 yang tercatat sebesar US\$ 509,30 juta.

Impor India dari Indonesia juga memperlihatkan kecenderungan meningkat, kecuali dalam periode Januari-Oktober 1998. Apabila dalam tahun 1992 impor India dari Indonesia baru mencapai US\$ 71,30 juta, maka dalam tahun



1997 sudah mencapai US\$ 711,20 juta, jadi meningkat sekitar 897,5%. Periode 1992-1997 impor India dari Indonesia rata-rata meningkat 149,6 % setiap tahun.

Untuk Periode Januari-Oktober 1998 impor India dari Indonesia sedikit, yaitu sekitar 0,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1997 yang mencapai US\$ 587.20 juta.

Neraca perdagangan kedua negara surplus di pihak India dalam tahun 1993 dan 1995, sedangkan untuk tahun 1994, 1996, 1997 dan 1998 surplus berada di pihak Indonesia. Defisit terbesar perdagangan India dengan Indonesia terjadi dalam tahun 1998. Dalam periode Januari-Oktober 1998 saja defisit tersebut sudah mencapai US\$ 459,39 juta, meningkat 489,7 % dari periode yang sama tahun 1997.

Hambatan-hambatan perdagangan antara kedua negara, ialah:

1. Masih banyak barang-barang Indonesia yang masuk ke India terkena kebijakan anti-dumping Pemerintah India sebagai upaya melindungi industri dalam negeri dari masuknya produk sejenis dari negara-negara lain (termasuk Indonesia), khususnya produk polyester film dan produk tekstil.
2. Masih terdapatnya keengganan (reluctant) di kalangan pengusaha Indonesia untuk mengadakan kontak dagang/investasi dengan pengusaha India, antara lain karena pengalaman buruk melakukan hubungan bisnis dengan India. Disamping itu, terdapat citra yang kurang baik mengenai pengusaha India di kalangan birokrasi, akademisi, dan dunia bisnis.
3. Kedua negara adalah penghasil dan pengeksport komoditas pertanian dan industri yang sama, sehingga menyulitkan bagi kedua pihak untuk meningkatkan hubungan perdagangan.



Sedangkan peluang perdagangan antar kedua negara, ialah:

1. India memiliki pasar yang besar, sumber alam yang kaya, SDM yang memiliki keahlian, teknologi yang maju, dan kelas menengah yang cukup besar. Oleh karenanya, potensi India yang besar ini layak untuk mendapat perhatian dari pemerintah maupun pengusaha Indonesia. Dari pihak India, komoditi dan proyek yang ditawarkan ialah: beras, kedelai, kopi, produk-produk pertanian lainnya, bahan baku dan produk-produk katun, bulk drug dan produk-produk farmasi, produk-produk besi dan baja, pembangunan jalur kereta api dan produknya, proyek ketenagaan, modernisasi pabrik gula, serta perangkat keras dan lunak komputer.
2. Dari pihak Indonesia, komoditas yang ditawarkan adalah: minyak kelapa sawit, minyak mentah dan produk-produk petrokimia, gas alam seperti LPG dan LNG, batubara dan bahan tambang lainnya, rempah-rempah dan produk-produk perkebunan, kayu, produk-produk kayu dan produk-produk kehutanan lainnya, pupuk, semen, clinker dan bahan-bahan bangunan, serta perhiasan logam.

b. Penanaman Modal

Kedua negara sangat berminat untuk meningkatkan penanaman modal sektor swasta kedua belah pihak. Untuk mengantisipasi makin meningkatnya penanaman modal di masing-masing pihak, kedua pemerintah telah menandatangani IGA pada bulan Pebruari 1999 pada saat berlangsungnya KTT G-15 di Montego Bay, Jamaica.

Menurut data-data Kementerian Industri India, FDI yang telah disetujui berasal dari Indonesia dari tahun 1991 sampai dengan 31 Oktober 1998 adalah sebesar Rs. 3.929,80 juta, merupakan 0,22 % dari total FDI yang disetujui dalam periode yang sama. Sedangkan menurut Indian Investment Centre



Publication, sampai dengan 30 Juni 1997, FDI Indonesia di India berjumlah US\$ 105,28 juta merupakan 0,29 % dari total FDI yang masuk ke India.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Abdurrahman Wahid ke India tanggal 8-9 Pebruari 2000, para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Minyak dan Gas Alam India berkunjung ke Jakarta pada tanggal 10-13 Juli 2000. Dalam kesempatan kunjungan ke Jakarta, rombongan tersebut ikut menghadiri Konferensi Energi Indonesia (Jakarta International Energy Conference/JIEC). Dalam konferensi yang dihadiri oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid tersebut, dibahas mengenai rencana India untuk menanamkan investasi di bidang minyak dan gas di Kalimantan Timur.

3.3. Kerjasama Teknik

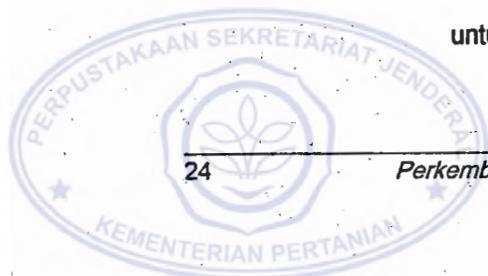
a. Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB)

Kerjasama teknik antara kedua negara dalam kerangka kerjasama Selatan- Selatan berjalan cukup lancar dimana kedua negara saling menawarkan program masing-masing untuk dapat dimanfaatkan. Indonesia menawarkan kerjasama teknik berdasarkan program KTNB (TCDC), dan pihak India berdasarkan Colombo Plan dan ITEC (India Technical Economic Cooperation). Program yang ditawarkan Indonesia selama ini meliputi training di bidang keluarga berencana, sosial, pertanian, koperasi, kehutanan, perumahan, kesehatan, peternakan, pekerjaan umum, telekomunikasi, hubungan masyarakat, pembudayaan masyarakat dan lain-lain. Program-program KTNB Indonesia disponsori oleh berbagai badan internasional dan negara ketiga, yaitu UNDP, Bank Dunia/ADB, JICA (Jepang), dan lain-lain. Di samping itu, beberapa program dibiayai keseluruhannya oleh pemerintah Indonesia.



Perkembangan kerjasama teknik India - Indonesia adalah:

1. Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation (MOU), yang ditandatangani oleh Menteri Muda Pertanian Dr. Syarifuddin Baharsyah dan Minister of State in the Minister of Agriculture H.E. Mr. Rama Chandran tanggal 20 Februari 1992. Catatan MOU, berdasarkan artikel IX MOU, maka perjanjian tersebut sudah berakhir pada tanggal 20 Februari 1999 (5 tahun automatic perpanjangan).
2. Sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut telah diadakan SOM (Senior Official Meeting) ke I di Jakarta tanggal 19-21 Januari 1995. Komponen-komponen kerjasama yang tertuang dalam MOU article I antara lain pertukaran tenaga ahli, kerjasama penelitian, study visit, joint venture, pertukaran germ plasm dan lain-lain yang dituangkan dalam action plan.
3. Dalam kerjasama tersebut disepakati mekanisasi pelaksanaan mengacu kepada struktur :
 - "Working Group" (antara lain : fisheries, horticulture, dll)
 - "Senior Official Meeting"
 - "Ministrial Meeting (bersidang 1 X dalam setahun bergantian di Indonesia dan India)
4. Kendala dalam realisasi kerjasama, yaitu:
 - a. Berdasarkan Article IV MOU menyebutkan bahwa "Sending Party" akan membayarkan sendiri ticket dan transportasi, sedangkan "Receiving Party" menanggung semua biaya yang dikeluarkan selama program kerjasama berlangsung. Hal ini tergantung dari ketersediaan dana masing-masing pihak
 - b. Dilihat dari struktur penganggaran di Indonesia hal tersebut belum pernah disetujui "BAPPENAS" dan Departemen Keuangan" dalam penyediaan anggaran rutin (APBN) untuk "Roundtrip Ticket" bagi pejabat Indonesia maupun



- menyiapkan anggaran bagi penerimaan tamu dari luar negeri.
- C. Mengingat periode waktu MOU telah berakhir pada tanggal 20 Februari 1995 (5 tahun + 2 tahun) maka diusulkan perlu amendement MOU khususnya article IV dan pembatasan ruang kerjasama article I.
5. Peluang Pembahasan Kerjasama dan Solusi Pemecahannya adalah:
- a. Sesuai resipokal pelaksanaan kerjasama bilateral, maka SOM ke I dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 19-21 Januari 1995, dan sesuai dengan kesepakatan SOM, maka sidang Ministerial Meeting akan dilaksanakan di India.
 - b. Mengingat point 4 tersebut diatas, yang secara teknis cukup berat bagi Indonesia maka sampai saat ini Ministerial Meeting belum terlaksana.
 - c. Untuk itu kemungkinan melakukan amendement dan addendum dari MOU 1992 dapat saja diusulkan.
Mengingat keuangan kedua negara sangat terbatas dalam mendanai program ini, maka satu-satunya solusi adalah mencari sumber pendanaan pihak ke II (donor).
6. Untuk merealisasikan kerjasama bilateral Indonesia-India di bidang pertanian, pada tanggal 11 Januari 2001, di Jakarta, telah ditandatangani "*Work Plan Under Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Agricultural Cooperation*", yang masing-masing dilakukan oleh Mr. Nelson P. Hutabarat, Sekretaris Jenderal Dep. Pertanian (mewakili pihak Indonesia) dan Mr. Bhaskar Barua, Sekretaris Departemen Kerjasama Pertanian (mewakili pihak India).



Didalam "Work Plan" tersebut telah disepakati kerjasama di bidang pertanian kedua negara (Indonesia-India), secara lengkap masing-masing sebagai berikut :

I. GOVERNMENT OF INDIA TO OFFER TO GOVERNMENT OF INDONESIA :

(A). WHEAT (Gandum)

1. Supply of varieties by the Directorate of Wheat Research (DWR) for testing in Indonesia for their suitability;
2. Training of two Experts of Indonesia for 10 days in India by the DWR in varietal testing & evaluation;
3. Training on Seed Production techniques by DWR and State Farms Corporation of India (SFCl) for two Indonesians for two months in India during crop flowering period;
4. Production technology in Wheat by sending two Indian Experts for 5-6 months to Indonesia for raising/testing wheat crop under their conditions;

(B). SOYABEAN (Kedele)

1. Supply of Soyabean varieties to Indonesia for their suitability by National Research Centre for Soyabean (NRCS);
2. Training to two Indonesians in India for two months in the production of seed by NRCS/SFCl;
3. Exchange of experts from India to Indonesia and vice-versa for 10 days on the study for production technology;

(C). SUGARCANE (Gula tebu)

1. Supply of varieties to Indonesia for their suitability;
2. Training on varietal testing, clean seed production



- through tissue culture by Sugarcane Breeding Institute to two experts from Indonesia in India for two months;
3. Exchange of experts on production technology, machinery etc. by sending two experts from India to Indonesia and vice-versa is for 10 days;
 4. Training on harvesting and processing of sugarcane in sugar mills including functioning of co-operative mills and use of by-products by the Central Institute of Sugarcane Research and Directorate of Sugarcane Development to two Indonesians for 10 days;

(D). POND, RESERVOIR AND GROUND WATER RECHARGE

1. Training on watershed development in India including visit to model watershed for 15 days by Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute;
2. Training of four Indonesians in India for 10 days on the efficient utilisation of water through micro-irrigation system like sprinkler, drip irrigation;
3. Consultancy in implementation of minor irrigation projects in Indonesia;

(E). AGRICULTURE MANAGEMENT

Training of two Indonesian experts for 10 days in India on Agriculture Management by National Institute of Agricultural Extension Management (NAARM);

(F). PRODUCTION AND USE OF HYBRID SEEDS OF RICE AND MAIZE

On the request made by the Government of Indonesia for specific information about availability of hybrids and maize both in public and private sector, the required information will be collected and communicated;



II. GOVERNMENT OF INDONESIA TO OFFER TO GOVERNMENT OF INDIA :

(A). Supply of varieties of paddy, maize, soyabean and sugarcane for their suitability;

(B). OIL PALM TECHNOLOGY AND COCONUT PROCESSING

Training of two Indian experts in Indonesia each for Oil Palm technology and Coconut Processing for 10 days;

(C). RICE CULTIVATION INCLUDING INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM)

Training of two Indian experts in Indonesia for three months;

(D). ACID SOIL MANAGEMENT

Exchange visit of two experts from India to Indonesia and vice-versa for 10 days on acid-soil management and suggest remedial measures for the management of acid-soil;

(E). EXCHANGE OF EXPERTS MENTIONED AGAINST SERIAL NUMBER 1 OF THE WORK PLAN

The items mentioned against Serial Number B (iii) and C (iii), in respect of para 1 of the Work Plan;

III. The Contracting Parties may by mutual consent, add to, amend or delete any provision of the Work Plan;

IV. The sending Contracting Party will bear the cost of air transport and the receiving Contracting Party will provide local hospitality for persons deputed under the Work Plan as per the financial arrangements indicated in Article IV of the MOU;

V. For accomplishing the exchange of visits, the sending Contracting Party shall inform the receiving Contracting Party at least 90 days in advance of the proposed visits. The



receiving Contracting Party shall inform the sending Contracting Party not later than 60 days after receipt of notice of the visit, its decision on acceptance of the nominees;

VI. The Work Plan shall take effect upon signing and shall remain in force up to December 31, 2002 unless sooner terminated, modified or extended by mutual agreement;

IV. PELUANG KERJASAMA

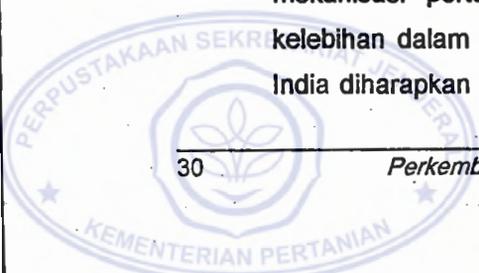
India memiliki pasar yang besar, sumber alam yang kaya, sumber daya manusia yang memiliki keahlian, teknologi yang maju dan kelas menengah yang cukup besar.

4.1. Kerjasama Teknik

Sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation tanggal 20 Pebruari 1992 telah diadakan Senior Official Meeting (SOM) ke-1 di Jakarta pada tanggal 19 – 21 Januari 1995. Pertemuan ini merupakan upaya untuk melakukan pertukaran tenaga ahli, kerjasama penelitian, study visit, joint venture dan pertukaran plasma nutfah (germ plasm).

Kerjasama teknik ini diperkuat dengan penandatanganan "Work Plan" di bawah MOU tersebut pada tanggal 11 Januari 2001 untuk tahun 2001/2002.

Dasar kerjasama teknik di atas, menunjukkan keseriusan dan keinginan kedua belah pihak untuk saling mengambil manfaat. Indonesia sangat berpeluang untuk lebih mengupayakan terjadinya transfer teknologi dan informasi dalam budidaya tanaman tropik (khususnya lahan kering), farming system, community development, water management, data base system dan genetic engineering. Hal ini mengingat India memiliki banyak tenaga ahli yang bekerja profesional di bidang pertanian pada organisasi-organisasi internasional. Kerjasama teknik ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan promosi dan pemasaran produk pertanian Indonesia ke India, khususnya kacang mete, buah-buahan, kopi, teh, kakao dan rempah-rempah (khususnya lada). Selain itu diharapkan kerjasama ini dapat dimanfaatkan dalam membangun industri alat mekanisasi pertanian di Indonesia; mengingat India mempunyai kelebihan dalam penguasaan teknologi logam dan peralatan berat. India diharapkan juga dapat membantu "reconditioning" industri gula



Indonesia, dan dalam tahap berikutnya untuk komoditas kedelai dan kapas.

4.2. Kerjasama Perdagangan dan Investasi

Neraca perdagangan kedua negara menunjukkan peningkatan dan surplus bagi Indonesia dalam lima tahun terakhir (1995 – 2000). Komoditas pertanian Indonesia yang memanfaatkan pasar India adalah buah-buahan dan kacang-kacangan (US \$ 39,631,993), kopi (US \$ 1,929,472), teh (US \$ 6,557,033), lada (US \$9,261,541) dan makanan ternak (US \$3,629,310).

Ekspor Indonesia diharapkan terus mengalami peningkatan pada masa mendatang, mengingat India merupakan pasar baru untuk produk pertanian. Indonesia perlu meningkatkan promosi dagang, kunjungan dagang, mendorong terjadinya "joint venture" dan menarik investasi teknologi dari India. Selain itu perlu dibangun sistem perdagangan kedua negara dengan "counter trade". Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan India dalam komoditas kedelai dan beras.

Kedua negara merupakan penghasil dan pengekspor komoditas pertanian yang sama. Kerjasama bilateral kedua negara diarahkan untuk membangun promosi dan pasar perdagangan internasional bersama agar didapat keuntungan yang maksimal. Sebagai contoh adanya arah kebijakan yang sama dalam mempertahankan harga pasar kopi dunia.

Guna mengatasi keengganan (reluctant) di kalangan pengusaha Indonesia untuk mengadakan kontak dagang/investasi dengan pengusaha India, pihak pemerintah kedua negara perlu memfasilitasi swasta dalam bentuk jaminan pemerintah kedua negara, menyertakannya dalam pertemuan-pertemuan bilateral, menyelenggarakan pameran dagang bersama dan adanya memorandum kesepakatan bersama (MOU) antar KADIN Indonesia dan India. Selain itu kedua negara perlu menetapkan kemudahan peraturan ekspor-impor pada berbagai komoditas.



Dalam membangun kerjasama bilateral, Indonesia diupayakan dapat memanfaatkan peluang kerjasama untuk menarik investasi bidang pertanian dari negara partner. Investasi asing di Indonesia dijamin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan investasi sektor pertanian diatur dengan Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000.

Investasi asing sektor pertanian dan industri makanan yang telah disetujui Pemerintah Indonesia secara umum mengalami peningkatan dan berfluktuasi dari tahun 1996 s/d 2000. Besarnya perkembangan investasi yang telah disetujui BKPM dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM.

(US\$ Million)

Tahun	Sektor Pertanian				Industri Makanan
	Tanaman Pangan	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	
1996	52,2	86,0	1.168,1	79,8	691,4
1997	234,4	1,8	200,4	27,1	572,8
1998	224,4	15,4	725,4	33,0	342,0
1999	80,6	48,3	283,8	69,7	680,9
2000	311,3	18,4	59,1	49,5	701,0

Kerjasama bilateral bidang pertanian pada masa mendatang diharapkan dapat memanfaatkan peluang investasi asing di Indonesia, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Adapun jenis komoditas, bidang investasi dan lokasi yang dapat dipromosikan secara bilateral dalam menarik investasi asing tersebut dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3.

4.3. Pembukaan Kantor Atase Pertanian

Pengaruh India dalam forum internasional bidang pertanian, besarnya peluang pasar produk pertanian dan kedekatan akses terhadap negara-negara Asia Selatan dan Tengah, perlu dimanfaatkan Indonesia untuk membangun kerjasama internasional



bidang pertanian dan pasar produk pertanian sekaligus menempatkan posisi tawar diplomasi Indonesia lebih baik di mata negara lain.

Guna meningkatkan meningkatkan transfer teknologi, promosi perdagangan, investasi dan hubungan diplomasi internasional bidang pertanian perlu adanya Kantor Perwakilan/Atase Pertanian di New Delhi-India.



Tabel Lampiran 1. PROFIL NEGARA REPUBLIK INDIA

Nama Negara	:	Republik India
Ibukota	:	New Delhi. Kota Delhi dibagi dua yaitu New Delhi dan Old Delhi. Istana Presiden dan kantor-kantor Pemerintah terletak di New Delhi.
Hari Republik	:	26 Januari (pada tanggal tersebut di tahun 1950 pengumuman berlakunya UUD India sebagai negara Republik).
Hari Nasional	:	15 Agustus (pada tanggal tersebut di tahun 1947 India memperoleh kemerdekaan dari Inggris).
Luas Wilayah	:	3.287.263 km ² .
Letak Geografis	:	Terletak di antara 8° 4' - 37° 6' LU dan antara 68° 7' - 97° 25' BT. Berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan di sebelah Barat Laut, dengan Cina, Nepal dan Bhutan di sebelah Utara sampai Timur Laut, dengan Myanmar dan Bangladesh di sebelah Timur. India juga berbatasan di sebelah Tenggara dengan Sri Lanka yang dipisahkan oleh Selat Palk dan Teluk Mannar. Selain itu Kepulauan Andaman & Nikobar berbatasan laut dengan Indonesia, Thailand dan Myanmar.
Jumlah Penduduk	:	Berdasarkan data perkiraan jumlah penduduk tanggal 11 Maret 2000, jumlah penduduk India telah melebihi 1 milyar dengan rata-rata pertumbuhan 1,71%/tahun. Tiga kota terbesar jumlah penduduknya adalah Mumbai 12.60 juta, Calcutta 11.02 juta, dan Delhi 8.42 juta. Sementara tiga kota terpadat adalah Calcutta, Chennai, dan Mumbai.
Bahasa	:	Bahasa Hindi sebagai bahasa resmi dan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan. Selain itu terdapat banyak bahasa nasional yaitu Assam, Bengali, Gujarat, Kanada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telegu, dan Urdu.
Agama	:	Hindu (85%), Islam (10%), Kristen (2%), Sikh (1,89%), Budha (0,70%), Jainisme (0,30%), Zeroaster (0,11%).
Pendapatan kapita per	:	US\$ 380 (Rs. 16055); PPP (Puchasing power parity) US\$ 1650.

Pemerintahan	:	Negara berbentuk republik Federal, dengan sistem Demokrasi Parlementer.
Presiden	:	Shri K.R. Narayanan
Wakil Presiden	:	Krishan Kant
Perdana Menteri	:	Atal Bihari Vajpayee
Menteri Luar Negeri	:	Jaswanth Singh



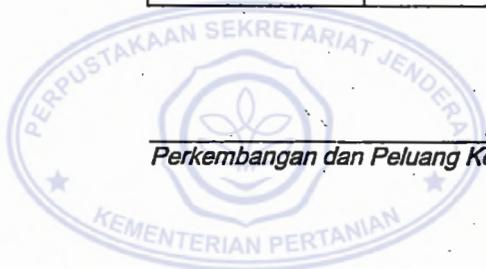
Tabel Lampiran 2. SUSUNAN KABINET PERDANA MENTERI A.B. VAJPAYEE (13 OKTOBER 1999)

1.	Perdana Menteri	:	Atal Bihari Vajpayee
2.	Menteri Luar Negeri	:	Jaswanth Singh
3.	Menteri Dalam Negeri	:	Lal Krihna Advani
4.	Menteri Keuangan	:	Jaswant Sinha
5.	Menteri Pertahanan	:	George Fernandes
6.	Menteri Perdagangan dan Industri	:	Murasoli Maran
7.	Menteri Perminyakan dan Gas	:	Ram Naik
8.	Menteri Penerbangan Sipil	:	Sharad Yadv
9.	Menteri SDM dan Iptek	:	Murii Manohar Joshi
10.	Menteri Perburuhan, Kota, dan Masalah Kemiskinan	:	Satya Narayan Jatiya
11.	Menteri Sumber Air dan Parlemen	:	Pramod Mahajan
12.	Menteri Kelistrikan	:	P.R. Kumaramangalam
13.	Menteri Pertekstil	:	Kashiram Rana
14.	Menteri Perkereta-apan	:	Mamata Banarjee
15.	Menteri Hukum, Pengadilan, dan Perusahaan	:	Ram Jethmalani
16.	Menteri Komunikasi	:	Ram Vilas Paswan
17.	Menteri Pembangunan Daerah	:	Sunderial Patwa
18.	Menteri Perhubungan Darat	:	Nitish Kumar
19.	Menteri Kimia dan Pupuk	:	Suresh Prabhu
20.	Menteri Kehutanan dan Lmgkungan Hidup	:	T.R. Baalu
21.	Menteri Pertambangan dan Mineral	:	Naveen Patnaik
22.	Menteri Industri Berat da BUMN	:	Manohar Jashi
23.	Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pemuda	:	Anant Kumar
24.	Menteri Kesukuan	:	Jual Oram
25.	Menteri Konsumen dan Distribusi	:	Shanta Kumar
26.	Menteri Pembangunan Kota	:	Jagmohan



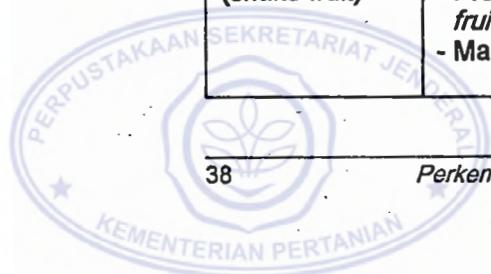
Tabel Lampiran 3. PELUANG INVESTASI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Commodities	Fields of investment	Provinces
<i>Food Crop</i>		
1. Paddy/rice	<ul style="list-style-type: none"> - Production input - Seeding - Agric. Machinery service - Marketing - Rice Milling Unit - Processing (rice powder) 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, South Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara Barat.
2. Cassava	<ul style="list-style-type: none"> - Marketing - Processing (tapiokca, <i>pellet glucosa</i>, starch, sorbitol, spiritus, dextrin) 	Lampung, North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, East Nusa Tenggara
3. Com	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (maize, cooking oil, maizena, ethanol, maize powder, feed, <i>organic acid</i>) 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, East Nusa Tenggara, North Sulawesi
4. Soybean	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (tempe, sauce, ketchup, powder, feed, cooking oil, nata de soy) 	West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, south Sulawesi, Lampung, West Nusa Tenggara
5. Groundnut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, South Sumatrer, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Wets Nusa Tenggara, South Kalimantan, South Sulawesi
6. Mungbean	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, South Sumatrer, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Wets Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, South Sulawesi



7. Sweet potato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatrer, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, East Nusa Tenggara, South Kalimantan, South East Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya
-----------------	--	--

Commodities	Fields of investment	Provinces
Horticulture		
1. Manggo	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned juice, dried fruit, jam, jelly, pickle</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Bali, NTB, NTT, South Sumatera, North Sumatera, Lampung, Yogyakarta
2. Durian	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Marketing 	North Sumatera, West Sumatrer, Riau, South Sumatera, Lampung, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan
3. Rambutan (hairy fruit)	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing 	West Java, Central Java, East Java, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Lampung, Yogyakarta, Bali, South Kalimantan, Central Sulawesi
4. Mangosteen	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Java, Bali, South Sulawesi, West Sumatera, Riau, Central Java, East Java
5. Salacca (snake fruit)	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing 	Central Java, Yogyakarta, East Java, North Sumatera, North Sulawesi, South Sulawesi, Bali, NTB, West Java,



		Irian Jaya
6. Orange	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, West Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan
7. Banana	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>Powder, chips, puree, jam, wine, syrup, nector, juice, jelly</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, NTB, NTT, Bali, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-East Sulawesi, West Kalimantan
8. Potato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>chips, powder</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi
9. Cabbage	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Marketing - Processing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, Jambi, South Sumatera, Lampung, Bali, South Sulawesi, North Sulawesi
10. Chilli	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>sauce, paste, powder, chilli oil, dried chilli</i>), 	North Sumatera, Riau, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta, South Sulawesi, North Sulawesi, NTB, Bali
11. Shallot	<ul style="list-style-type: none"> - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, NTB, West Sumatera, Lampung
12. Carrot	<ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
13. Tomato	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu,

	- Marketing	South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
14. Orchid and other ornamental plant	- Seedling - Cultivation - Processing (<i>oriental plant : parfume</i>) - Marketing	North Sumatera, Bengkulu, Jambi, West Java, West Kalimantan, East Kalimantan, Irian Jaya, Riau, North Sulawesi, Bali, Yogyakarta, Jakarta
15. Medicine plant	- Seedling - Cultivation - Processing (traditional medicine/jamu) - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi

Commodities	Fields of investment	Provinces
Livestock		
1. Cattle	- Breeding - Fattening - Processing (<i>corned beef, sausage, leather industry</i>) - Marketing	West Sumatera, Lampung, South Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT
2. Dairy cow	- Breeding - Fattening - Processing (milk, milk sweet, cheese, <i>yoghut</i>) - Marketing	West Java, Central Java, East Java, Lampung
3. Poultry	- Breeding - Cultivation - Processing (<i>corned, sausage</i>) - Marketing	Java, Lampung, South Sulawesi, East Kalimantan
4. Goat	- Breeding - Fattening - Processing (milk, leather, sausage) - Marketing	Sumatera, Java, West Kalimantan
5. Pig	- Breeding - Fattening - Processing (sausage) - Marketing	West Kalimantan, Riau, Islands, North Sumatera, Irian Jaya



Commodities	Fields of investment	Provinces
Estate		
1. Rubber	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (latex, dried rubber, <i>crumb rubber, slab</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, South Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi
2. Palm oil	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (CPO, <i>palm karnel, sludge</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya
3. Coffe	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (powder, <i>cofee green, instan coffe</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
4. Cacao	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>cocoa, powder, cocoa cake, fat, shall, pilp</i>) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Lampung, Bali, NTT, Bengkulu, West Java, Central Java, Yogyakarta, West Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
5. Cashew nut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>fried cashew nut, shell liquid, sweet</i>) - Marketing 	Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
6. Coconut	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (cooking oil, coconut coal/arang, handy craft) - Marketing 	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java,

		Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
7. Pepper	<ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (medicines, pepper powder, seasoning) - Marketing 	South sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Kalimantan, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, South-east Sulawesi





BAGIAN PROYEK PENINGKATAN KERJASAMA LUAR NEGERI
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2001